

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif Data Umum

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Responden yang dipakai dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sub Bagian Keuangan seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terdapat 28 SKPD di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang menjadi lokasi penelitian. Persetujuan dalam melaksanakan penelitian, pembagian kuesioner, hingga proses pengumpulan kuesioner, hingga pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret sampai April 2019. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, kuesioner yang disebar berjumlah 112 lembar eksemplar dan kembali dalam jumlah 91 lembar eksemplar, serta kuesioner yang dapat diolah sejumlah 91 lembar eksemplar. Berikut ini merupakan gambaran karakteristik data kuesioner:

Tabel 4.1 Karakteristik Data Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	112	100%
Kuesioner yang kembali	91	81,25%
Kuesioner yang tidak kembali	21	18,75%
Kuesioner yang dapat diolah	91	81,75%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

4.1.1 Profil Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU no 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa. Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dinas daerah, badan daerah. Perangkat daerah dimaksud bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm 90\%$) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa : batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa. Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai panjang pantai yang

cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 kilometer dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di DIY dengan jumlah penduduk cukup besar. Berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 berjumlah 680.406 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 328.878 jiwa dan perempuan sebanyak 351.528 jiwa.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 tanggal 15 Maret 2010 ditetapkan visi Kabupaten Gunungkidul yaitu "Gunungkidul yang berdaya sains maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2025". Gunungkidul yang berdaya saing dimaknai dengan perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi. Gunungkidul yang maju dimaknai sebagai perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Gunungkidul yang mandiri ditandai dengan adanya perwujudan kondisi masyarakat yang merdeka, saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya, sikap masyarakat mengenai dirinya

sendiri dan masyarakatnya, semangatnya kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan Gunungkidul yang sejahtera dimaknai dengan perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tersebut, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan enam misi pembangunan daerah yaitu mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih; mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian; mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah; mewujudkan penyediaan sarana sarana dasar yang memadai; dan mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

4.1.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi populasi dalam penelitian ini terbagi menjadi berbagai golongan, yaitu: menurut jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, pendidikan terakhir, lama waktu bekerja, dan latar belakang pendidikan.

4.1.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Presentase
Laki-laki	42	46.15%
Perempuan	49	53.85%
Total	91	100.0%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 49 orang (53,85%), sedangkan yang laki-laki sejumlah 42 orang (46,15%).

4.1.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Deskripsi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Presentase
21 - 30 tahun	4	4.40%
31 - 40 tahun	6	6.49%
41 - 50 tahun	37	40.76%
51 - 60 tahun	44	48.35%
Total	91	100.00%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia antara 51-60 tahun yaitu sejumlah 44 orang (48,35%), sedangkan usia 41-50 tahun sejumlah 38 orang (41,76%), usia 31-40 tahun hanya sebanyak 5 orang (5,49%), dan usia 21-30 tahun hanya sebanyak 4 orang (4,40%).

4.1.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA/ sederajat	4	4.40%
Diploma	3	3.30%
Sarjana	59	64.84%
Magister	24	26.37%
Lainnya	1	1.10%
Total	91	100.00%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan terakhir Sarjana yaitu sejumlah 59 orang (64,84%). Responden dengan pendidikan terakhir Magister sejumlah 24 orang (26,37%), pendidikan terakhir SMA/ sederajat sejumlah 4 orang (4,40%), pendidikan terakhir Diploma sejumlah 3 orang (3,30%), dan lainnya sejumlah 1 orang (1,10%).

4.1.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Keterangan	Jumlah	Presentase
1 – 2 tahun	7	7.69%
3 - 4 tahun	4	4.40%
> 5 tahun	80	87.91%
Total	91	100.00%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar bekerja selama > 5 tahun yaitu sejumlah 80 orang (87,91%). Sedangkan responden dengan lama bekerja 1-2 tahun hanya sejumlah 7 orang (7,69%) dan dengan lama bekerja selama 3-4 tahun hanya sejumlah 4 orang (4,40%).

4.1.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Deskripsi responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Keterangan	Jumlah	Presentase
Akuntansi	22	24.18%
Manajemen	9	9.89%
Ilmu Ekonomi	19	20.88%
Lainnya	41	45.05
Total	91	100.00%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki latar belakang yang bukan di bidang keuangan yaitu sejumlah 41 orang (45,05%). Sedangkan responden dengan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi hanya sejumlah 22 orang (24,18%), dengan latar belakang pendidikan manajemen sejumlah 9 orang (9,89%), dan dengan dengan latar belakang pendidikan ilmu ekonomi sejumlah 19 orang (20,88%).

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel pada penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif terdiri dari total responden penelitian, nilai minimum skor setiap variabel, nilai maksimum skor setiap variabel, nilai rata-rata (*mean*) skor setiap variabel, dan nilai standar deviasi pada seluruh skor setiap variabel. Di bawah ini ialah tabel yang menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dengan bantuan *software* Statistik yaitu SPSS 20.0.

Table 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	n	Min	Max	Mean	SD
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	91	1	5	4.22777	0.555
Komitmen Organisasi	91	1	5	3.72627	0.982
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	91	1	5	4.1956	0.654
Kompetensi Sumber Daya Manusia	91	1	5	3.87424	0.774
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah	91	2	5	4.33595	0.517
Pemanfaatan Teknologi Informasi	91	2	5	4.34799	0.507

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan hasil instrument statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti, penjelasannya sebagai berikut

1. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai *score* minimum sebesar 1, nilai *score* maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4,22777 dan nilai standar deviasi sebesar 0,555.
2. Variabel Komitmen Organisasi memiliki nilai *score* minimum sebesar 1, nilai *score* maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 3,72627 dan nilai standar deviasi sebesar 0,982.
3. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai *score* minimum sebesar 1, nilai *score* maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4,1956 dan nilai standar deviasi sebesar 0,654.
4. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai *score* minimum sebesar 1, nilai *score* maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 3,87424 dan nilai standar deviasi sebesar 0,774.

5. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai *score* minimum sebesar 2, nilai *score* maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4,33595 dan nilai standar deviasi sebesar 0,517.
6. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai *score* minimum sebesar 2, nilai *score* maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4,34799 dan nilai standar deviasi sebesar 0,507.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2012). Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai Pearson Correlation, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung $>$ r tabel. Hasil pengujian validitas dengan metode Pearson Correlation dalam penelitian ini dapat dilihat Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	KLKPD 1	0,430	0,267	Valid
	KLKPD 2	0,581	0,267	Valid
	KLKPD 3	0,635	0,267	Valid
	KLKPD 4	0,657	0,267	Valid
	KLKPD 5	0,556	0,267	Valid
	KLKPD 6	0,757	0,267	Valid
	KLKPD 7	0,696	0,267	Valid
	KLKPD 8	0,732	0,267	Valid
	KLKPD 9	0,607	0,267	Valid

	KLKPD 10	0,760	0,267	Valid
	KLKPD 11	0,610	0,267	Valid
Komitmen Organisasi	KO 1	0,552	0,267	Valid
	KO 2	0,578	0,267	Valid
	KO 3	0,553	0,267	Valid
	KO 4	0,657	0,267	Valid
	KO 5	0,578	0,267	Valid
	KO 6	0,649	0,267	Valid
	KO 7	0,703	0,267	Valid
	KO 8	0,614	0,267	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	SPIP 1	0,471	0,267	Valid
	SPIP 2	0,843	0,267	Valid
	SPIP 3	0,825	0,267	Valid
	SPIP 4	0,860	0,267	Valid
	SPIP 5	0,390	0,267	Valid
	SPIP 6	0,719	0,267	Valid
	SPIP 7	0,783	0,267	Valid
	SPIP 8	0,740	0,267	Valid
	SPIP 9	0,587	0,267	Valid
	SPIP 10	0,543	0,267	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia	KSDM 1	0,496	0,267	Valid
	KSDM 2	0,735	0,267	Valid
	KSDM 3	0,802	0,267	Valid
	KSDM 4	0,774	0,267	Valid
	KSDM 5	0,753	0,267	Valid
	KSDM 6	0,667	0,267	Valid
	KSDM 7	0,756	0,267	Valid
	KSDM 8	0,674	0,267	Valid
	KSDM 9	0,633	0,267	Valid
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah	PSAKD 1	0,745	0,267	Valid
	PSAKD 2	0,649	0,267	Valid
	PSAKD 3	0,835	0,267	Valid
	PSAKD 4	0,756	0,267	Valid
	PSAKD 5	0,843	0,267	Valid
	PSAKD 6	0,870	0,267	Valid
	PSAKD 7	0,832	0,267	Valid
Pemanfaatan Teknologi	PTI 1	0,851	0,267	Valid
	PTI 2	0,822	0,267	Valid

Informasi	PTI 3	0,893	0,267	Valid
	PTI 4	0,818	0,267	Valid
	PTI 5	0,857	0,267	Valid
	PTI 6	0,807	0,267	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Menurut tabel hasil pengujian validitas di atas, menggunakan Nilai R tabel dengan $n = 90$ dan tingkat signifikansi 0,01 sebesar 0,267. berdasarkan hasil kalkulasi seluruh pernyataan pada variabel-variabel penelitian memiliki nilai R hitung lebih tinggi dari R tabel dengan kata lain semua item pernyataan pada variabel-variabel penelitian dapat dinyatakan valid kemudian dapat digunakan untuk dilakukan pengukuran selanjutnya terhadap data penelitian.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kesungguhan responden menjawab pertanyaan. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's Alpha dengan instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. Apabila nilai Cronbach's Coefficient Alpha lebih besar dari 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach's Coefficient Alpha lebih kecil 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dengan metode Cronbach's Alpha pada penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,849	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,750	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,876	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,832	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah	0,895	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,916	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan uji validitas di atas, diperoleh nilai Cronbach's Alpha dari keenam variabel penelitian yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkn nilai 0,6. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh jawaban responden terhadap semua variabel penelitian dapat dikatakan *reliable*, kemudian hasil jawaban pada kuesioner dapat digunakan untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui distribusi data dalam suatu variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian apakah data layak atau tidak untuk dianalisis. Data dikatakan berdistribusi normal apabila koefisien asymp sign (2-tailed) lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig.	Keterangan
1,155	0,139	Normal

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Berdasarkan table hasil uji normalitas di atas, didapatkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,139. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai alpha (α) yaitu sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan jika data pada penelitian ini memiliki distribusi data yang normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara variabel independen. Gangguan multikolinieritas dapat diketahui dengan menganalisis nilai tolerance dan VIF. Jika nilai Nilai determinasi lebih dari ($VIF > 10$) dan angka tolerance $< 0,10$, maka terjadi masalah multikolinieritas. Sedangkan jika nilai Nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,1$ maka model regresi pada penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Komiten Organisasi	0,608	1,644	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,434	2,306	Tidak terjadi multikolinieritas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,634	1,577	Tidak terjadi multikolinieritas
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah	0,309	3,233	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,324	3,09	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Menurut tabel di atas, dapat diambil kesimpulan jika semua variabel bebas tidak mengalami masalah multikolinearitas karena semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui model regresi yang diteliti apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual variabel yang diamati. Model regresi baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Peneliti menggunakan uji statistik dengan teknik uji Glejser untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Nilai Signifikansi	Nilai α	Keterangan
Komiten Organisasi	0.308	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0.690	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.972	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah	0.867	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.194	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2019

Menurut tabel di atas, dapat diambil kesimpulan jika pada semua variabel bebas tidak ditemukan adanya permasalahan mengenai heteroskedastisitas karena seluruh nilai signifikansi pada setiap variabelnya memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Pengujian Parsial (Uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, standar akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, dilakukan pengujian signifikansi parameter individu, pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level ($\alpha = 5\%$). Hasil uji t-test dapat ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16.677	3.529		4.726	.000
1					
Komitmen Organsasi	.498	.090	.126	1.270	.048
SPIP	.275	.096	.339	2.878	.005
Kompetensi SDM	.085	.092	.091	.929	.356
Penerapan SAKD	.625	.186	.004	.027	.039
Pemanfaatan TI	.449	.201	.305	2.235	.028

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah $Y_{\text{kualitas LKPD}} = 16,667 + 0,498X_1 + 0,275X_2 + 0,085X_3 + 0,625X_4 + 0,449X_5$.

Berdasarkan nilai konstanta dan nilai signifikansi masing-masing variable diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Komitmen Organisasi

Variabel Komitmen Organisasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,498 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048 menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi signifikansinya di atas 0,05 ($0,048 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut maka variabel Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti hipotesis 1 (H_1) diterima. Artinya Komitmen Organisasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar 0,275 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah signifikansinya di bawah 0,05 ($0,005 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut maka variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti hipotesis 2 (H_2) diterima. Artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sangat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel Sumber Daya Manusia memiliki nilai koefisien sebesar 0,085 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,356 menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia signifikansinya di atas 0,05 ($0,356 > 0,05$). Berdasarkan hal

tersebut maka variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti hipotesis 4 (H_4) ditolak. Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

4. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,625 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,039 menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah signifikansinya di bawah 0,05 ($0,039 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut maka variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, berarti hipotesis 4 (H_4) diterima. Artinya Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sangat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

5. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,449 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028 menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi signifikansinya di bawah 0,05 ($0,028 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut maka variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti hipotesis 5 (H_5) diterima. Artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sangat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

4.5.2 Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya, analisis menggunakan uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan yang signifikansi terhadap variabel dependen. Hasil Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F) dalam penelitian ini akan digambarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	621.945	5	124.389	16.147	.000 ^b
	Residual	654.802	85	7.704		
	Total	1276.747	90			

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas, hasil dari Uji F menunjukkan bahwa signifikansinya adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Nilai F hitung lebih tinggi dibandingkan dengan F tabel (pada df 5;90) yaitu $16,147 > 2,32$ maka model regresi yang digunakan telah tepat atau fit, yaitu Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara

simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.3 Pengujian Koefisien Deterinasi (Uji R²)

Koefisien determinan (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel *dependent* (terikat). Range nilainya antar 0-1, apabila nilai R² kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya apabila R² besar berarti kemampuan variabel-variabel *independent* (bebas) dalam menjelaskan variabel dependen pun juga besar. Menurut Ghozali (2005), nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil Pengujian Koefisien Deterinasi (Uji R²) pada penelitian ini akan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 ^a	.487	.457	2.776

Nilai adjusted R square (R²) sebesar 0.457 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi mampu menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 45,7% sedangkan

sisanya 54,3% (100%-45,7%) dijelaskan oleh variabel lain diluar kelima variabel independen diatas.

4.6 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, yang artinya dengan adanya kebijakan dan peraturan yang dijalankan dengan baik oleh pelaku organisasi dapat mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif.

Komitmen yang kuat dalam organisasi akan dapat menciptakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas karyawan terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi sangat penting karena memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai, dimana setiap pegawai dituntut memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaannya.

Pegawai pada Sub Bagian Keuangan seluruh SKPD Kabupaten Gunungkidul yang memiliki komitmen tinggi dalam organisasi akan bersedia bekerja secara aktif dalam organisasi sehingga karyawan tersebut akan menunjukkan keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam kesejahteraan dan keberhasilan SKPD tempatnya bekerja. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karyawan yang memiliki komitmen tinggi pada organisasi dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik atau dengan kata lain berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaripudin (2015) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Survei Pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung) dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon, Mariana, Hasibuan, dan Basid (2019) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu adanya komitmen organisasi yang tinggi dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen menggambarkan loyalitas, ketertarikan, keterlibatan sumber daya manusia dalam melakukan tugas tanggungjawabnya sesuai peraturan yang berlaku.

4.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, yang artinya semakin baik pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada, maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem pengendalian Internal telah memenuhi fungsinya

dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang (1) keandalan laporan keuangan (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang dilaksanakan secara integral dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas kepercayaan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan pengendalian intern dalam pemerintah Kabupaten Gunungkidul sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Pengendalian intern yang telah diterapkan dengan baik dapat dilihat dari bentuk struktural entitas yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga pembagian tanggung jawab yang jelas di dalam organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzia (2014), Hidayati (2016), dan Fikri, Made, dan Yogivaria (2016) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasha (2018), Purnomo (2014), dan Rahmawati (2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, yang artinya semakin tinggi pendidikan, keterampilan di bidang akuntansi dan adanya pelatihan tidak selalu berdampak dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun pegawai pada sub bagian keuangan hampir seluruhnya tidak memiliki kompetensi yang memadai, namun tetap berhasil menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan dibuktikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang selama empat tahun terakhir mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia pada sub bagian keuangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum mencukupi dan belum memenuhi peraturan penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi. Sebagian besar karyawan di SKPD Kabupaten Gunungkidul pada sub bagian keuangan tidak memiliki latar pendidikan akuntansi atau hanya sebesar 24,18% yang memiliki latar pendidikan akuntansi. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul secara berturut-turut sebelum tahun 2015 selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sukmaningrum (2012) yang hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dan tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ihsanti (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan tidak dapat dengan cepat memahami apa yang harus dikerjakan karena kondisi tingkat pendidikan karyawan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Ditinjau dari sisi kualifikasi, sebagian besar karyawan sub bagian keuangan tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. Sementara, fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang memiliki kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.

4.5.4 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, yang artinya semakin baik pemahaman karyawan terhadap pengindentifikasian, pencatatan, dan pelaporan segala transaksi yang terjadi pada SKPD Kabupaten Gunungkidul maka akan berdampak semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntansi yang meliputi penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, dan laporan keuangan konsolidasi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu ketika standar akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik dan benar maka sudah pasti laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin berkualitas karena sudah disusun sesuai dengan peraturan yang ada.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumo (2018), Nurillah & Muid (2014), dan Pujanira & Taman (2017). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin baik penerapan standar akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik. Apabila karyawan sub bagian keuangan SKPD telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang memiliki kesesuaian dengan peraturan yang ditetapkan sehingga akan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar serta tidak terdapat adanya salah saji material maka tidak akan menyesatkan para pengguna informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

4.5.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih bersamaan dengan pemahaman, penguasaan, pelatihan dan proses kerja yang baik, maka teknologi dapat dimanfaatkan dengan tepat.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ternyata menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ternyata telah mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Agar laporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik tersebut, maka perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemerintah daerah dalam mengelola transaksi keuangan berdasarkan APBD tentunya akan merasa semakin kompleks karena jumlah transaksi yang semakin banyak. Pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan teknologi komputer dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan baik dalam hal relevan maupun reliabel dalam menyajikan laporan keuangan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Windyaningrum dan Rahmawati (2010) mengemukakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tersebut terdiri dari (a) proses kerja secara elektronik, sistem manajemen, pengolahan informasi, dan pengolahan data serta (b) penggunaan teknologi yang telah mengalami perkembangan secara pesat informasi agar penyajian pelayanan bagi publik mampu diakses secara murah serta mudah untuk rakyat di segala daerah Indonesia ini. Hal tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul ternyata telah mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Agar pelaporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik tersebut, maka perlu optimalisasi penggunaan kemajuan teknologi informasi sebagai cara dalam mengembangkan jaringan sistem informasi manajemen beserta proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terintegrasi dengan menghilangkan kerumitan pada akses antar unit kerja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul; (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul; (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul; (4) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunungkidul; dan (5) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebaiknya sampel penelitian yang digunakan diperluas, tidak hanya satu kabupaten saja, namun disarankan untuk menggunakan sampel seluruh kabupaten di Indonesia.
2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya memperbanyak presentase jumlah responden yang diteliti.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai media untuk pencarian data hal tersebut menjadi salah satu keterbatasan peneliti dikarenakan terkadang responden memberikan jawaban yang kurang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden secara langsung, sehingga dimungkinkan adanya bias di dalam pengisian kuesioner.
3. Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian ini relatif pendek padahal kebutuhan sampel sangat besar.
4. Sampel yang digunakan perlu ditambah jumlahnya sehingga hasil lebih akurat.